

## **Analisis Formulasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia: Antara Niat Baik, Salah Sasaran, dan Risiko Tata Kelola**

**Regi Mokodongan<sup>1</sup>, Ellys Rachman<sup>2</sup>, Sry Ade Muhtya Gobel<sup>3</sup>, Tri Adi Himawan<sup>4</sup>**

Universitas Bina Taruna Gorontalo

[regimokodongan@gmail.com](mailto:regimokodongan@gmail.com)<sup>1</sup>, [ellysrachman12@gmail.com](mailto:ellysrachman12@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[sryabel.gobel@gmail.com](mailto:sryabel.gobel@gmail.com)<sup>3</sup>,

### **ABSTRAK**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia. Namun, implementasinya memunculkan berbagai perdebatan terkait ketepatan sasaran, efektivitas anggaran, dan risiko tata kelola. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, publikasi akademik, serta berbagai sumber sekunder yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan formulasi kebijakan publik yang menitikberatkan pada identifikasi masalah, penetapan agenda, perumusan alternatif kebijakan, dan analisis pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan MBG dilandasi oleh tujuan mulia untuk mengatasi masalah gizi dan ketimpangan akses pangan. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan, antara lain potensi salah sasaran penerima manfaat, keterbatasan data pendukung, risiko pemborosan anggaran, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Selain itu, kompleksitas koordinasi antarlembaga berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan program. Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas formulasi kebijakan, ketepatan sasaran, transparansi tata kelola, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan guna memastikan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh kelompok yang membutuhkan.

**Kata Kunci: Formulasi Kebijakan; Makan Bergizi Gratis; Kebijakan Publik; Tata Kelola; Ketepatan Sasaran**

---

**ABSTRACT**

The Free Nutritious Meals Program (MBG) is one of Indonesia's strategic public policies aimed at improving community nutrition, particularly among school-aged children, while supporting human capital development. However, its implementation has generated debates regarding targeting accuracy, budget effectiveness, and governance risks. This study employs a qualitative approach using a library research method. Data were collected from policy documents, legislation, government reports, academic publications, and other relevant secondary sources. The analysis applies a public policy formulation framework focusing on problem identification, agenda setting, policy alternatives, and stakeholder analysis. The findings indicate that the formulation of the MBG policy is driven by a strong commitment to addressing nutritional problems and unequal access to food. Nevertheless, several challenges remain, including the risk of mistargeting beneficiaries, limited supporting data, potential budget inefficiencies, and weaknesses in monitoring and accountability mechanisms. Furthermore, inter-agency coordination complexity may reduce the effectiveness of policy implementation. The success of the MBG program depends not only on the availability of financial resources but also on the quality of policy formulation, accurate beneficiary targeting, transparent governance, and the strengthening of monitoring and evaluation systems to ensure that program benefits reach those most in need.

**Keywords:** Policy Formulation; Free Nutritious Meals; Public Policy; Governance; Targeting Accuracy

---

**PENDAHULUAN**

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan investasi strategis yang menentukan trajektori pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa dalam jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, urgensi tersebut tercermin secara eksplisit dalam visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan penguatan kualitas SDM sebagai fondasi utama pembangunan nasional (Albaburrahim dkk., 2025; Khatimah dkk., 2025; Wahyuni dkk., 2025). Berbagai kajian empiris telah mengkonfirmasi bahwa kualitas gizi pada masa awal kehidupan memiliki efek yang persisten terhadap kapasitas kognitif, produktivitas tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Wang dkk., 2021; World Bank, 2023). Dalam kerangka inilah persoalan malnutrisi anak di Indonesia perlu dipahami bukan sekadar sebagai masalah kesehatan, melainkan sebagai hambatan struktural terhadap pembangunan SDM yang berkelanjutan. Sebagai negara berpendapatan menengah ke atas dengan tingkat ketimpangan ekonomi antardaerah yang signifikan, Indonesia menghadapi tantangan gizi yang bersifat kompleks dan berlapis (Fatimah dkk., 2024; Firmansyah dkk., 2024; Mulu & Mengistie, 2017).

Kompleksitas permasalahan gizi di Indonesia termanifestasi dalam kondisi beban gizi ganda (*double burden of malnutrition*) yang ditandai oleh koeksistensi antara masalah kekurangan gizi dan kelebihan gizi dalam populasi yang sama (Muharram dkk., 2025). Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI, prevalensi stunting nasional pada balita mengalami penurunan dari 21,5% (SKI 2023) menjadi 19,8% pada tahun 2024 melampaui target RPJMN tahunan sebesar 20,1%. Kendati tren ini positif, angka tersebut masih melampaui ambang batas standar WHO dan masih jauh dari target RPJMN 2029 sebesar 14,2%. Di sisi lain, data SKI 2023 mencatat prevalensi anemia pada anak sebesar 23,8% Kemnko PMK, (2025), sementara UNICEF Indonesia, (2024) melaporkan bahwa sekitar satu dari lima anak usia sekolah (5-12 tahun) mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Kondisi ini sejalan dengan temuan Sutrisno dkk., (2026) yang mengkonfirmasi korelasi signifikan antara ketidakamanan pangan rumah tangga dan risiko stunting pada anak di Indonesia, serta temuan Firmansyah dkk., (2024) yang menunjukkan bahwa ketidakamanan pangan berdampak langsung pada status gizi balita di berbagai provinsi.

Realitas epidemiologis tersebut mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025 sebagai salah satu program unggulan (*quick wins*) dalam Asta Cita. Program ini mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp 71 triliun untuk tahun 2025 dengan target 82,9 juta penerima manfaat yang mencakup siswa PAUD hingga SMA/SMK, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (BKPK, 2025). Secara nominal dan cakupan, MBG merupakan salah satu program intervensi gizi terbesar dalam sejarah Indonesia. Namun persoalan fundamental yang segera muncul adalah apakah desain program ini memiliki landasan kausal yang kuat terhadap tujuan yang hendak dicapainya khususnya penurunan stunting. Kiftiyah dkk., (2025) mengingatkan bahwa efektivitas program gizi sangat ditentukan oleh ketepatan identifikasi kelompok sasaran dan relevansi mekanisme intervensi terhadap akar masalah. Dalam hal ini, konsensus ilmiah global menetapkan bahwa pencegahan stunting secara efektif hanya dimungkinkan melalui intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK) periode kehamilan hingga usia 23 bulan bukan pada anak usia sekolah yang jendela kritisnya sudah tertutup (A'ini dkk., 2023).

Masalah penelitian yang dihadapi bukan hanya soal ketidaktepatan sasaran,

melainkan juga menyangkut kualitas tata kelola program yang secara langsung memengaruhi efektivitas dan legitimasi kebijakan. Sejak implementasinya, MBG menghadapi serangkaian persoalan tata kelola yang serius: *Transparency International Indonesia* (2025) mengidentifikasi risiko korupsi sistemik dalam mekanisme penunjukan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); *Indonesia Corruption Watch* (2025) menemukan bahwa sepertiga dari yayasan mitra SPPG yang diteliti memiliki afiliasi politik yang signifikan; Ombudsman RI, (2025) mencatat delapan bentuk maladministrasi dalam penyelenggaraan program; dan tercatat lebih dari 6.400 kasus keracunan makanan sepanjang tahun 2025. Kajian Askar dkk., (2025) bahkan menemukan *inclusion error* sebesar 34,2% dengan estimasi potensi pemborosan senilai Rp 8,4 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan MBG bersifat ganda: cacat pada desain kausal sekaligus kegagalan pada tata kelola implementasi (Suhaeni dkk., 2025).

Dalam upaya mencari solusi terhadap persoalan ketidaktepatan intervensi gizi, literatur ilmiah secara konsisten menunjukkan bahwa program makan sekolah memiliki manfaat yang terukur dalam dimensi pendidikan, bukan penurunan stunting secara langsung. Wang dkk., (2021) melalui tinjauan sistematis dan meta-analisis terhadap 57 studi di negara berpendapatan rendah dan menengah menemukan bahwa program makan sekolah secara signifikan meningkatkan kehadiran siswa (+2,6% hari sekolah), berat badan (+0,58 kg), dan tinggi badan (+0,32 cm) dalam 12 bulan. Wall et al. (2022) mengkonfirmasi korelasi positif antara program makan sekolah dan peningkatan kemampuan belajar serta partisipasi pendidikan di negara-negara Afrika sub-Sahara. Sementara itu, Zerga dkk., (2022) melalui meta-analisis menemukan bahwa stunting, kekurangan berat badan, dan defisiensi yodium berdampak signifikan terhadap prestasi akademik anak (Masitoh dkk., 2023). Olehnya, manfaat program makan sekolah terbatas pada dimensi pendidikan jangka pendek, dan tidak dapat disamakan dengan intervensi anti-stunting yang mensyaratkan sasaran pada periode 1.000 HPK.

Solusi yang lebih tepat secara ilmiah untuk mengatasi stunting berangkat dari intervensi yang menyasar kelompok 1.000 HPK secara terintegrasi. Dewi dan Sutrisno dkk., (2026) dalam tinjauan sistematis terhadap 16 studi di Indonesia mengkonfirmasi bahwa ketidakamanan pangan rumah tangga memiliki korelasi positif dengan risiko stunting pada balita, dan bahwa kelompok yang paling membutuhkan intervensi adalah ibu hamil dan bayi usia 0-23 bulan. Sulaeman dkk.

(2023) melalui analisis data representatif nasional mengidentifikasi determinan sosial dan lingkungan stunting yang berpusat pada periode prenatal dan postnatal dini. Studi Soetono & Barokah, (2024) menegaskan bahwa periode 1.000 HPK terutama 280 hari dalam kandungan, 0-6 bulan (fase ASI eksklusif), dan 6-24 bulan (fase MPASI) merupakan jendela intervensi yang tidak tergantikan. Intervensi di luar periode ini, termasuk program makan bagi anak sekolah, tidak memiliki kapasitas kausal untuk menurunkan prevalensi stunting secara langsung.

Kajian-kajian sebelumnya mengenai program MBG umumnya bersifat deskriptif atau normatif, terbatas pada analisis kebijakan tanpa mengintegrasikan perspektif ilmu gizi klinis sebagai basis penilaian. (Albaburrahim dkk., 2025) menganalisis MBG dalam kerangka transformasi pendidikan menuju Generasi Emas 2045, namun tidak menyentuh persoalan ketepatan kausal program. Fatimah dkk., (2024) mengkaji tantangan implementasi MBG di Indonesia Timur dari perspektif ketahanan pangan, tetapi tidak mempersoalkan logika sasaran program. Kiftiyah dkk., (2025) menganalisis MBG dari perspektif keadilan sosial namun tidak menguji validitas klaim anti-stuntingnya. Kajian tata kelola oleh *Transparency International Indonesia* (2025), ICW (2025), dan Ombudsman RI, (2025) menyajikan temuan empiris yang kuat namun tidak mengintegrasikannya dengan teori formulasi kebijakan publik yang komprehensif. Kesenjangan penelitian yang signifikan dengan demikian terletak pada tidak adanya kajian yang secara bersamaan menganalisis (a) ketepatan logika kausal MBG berdasarkan bukti epidemiologi stunting, (b) kualitas proses formulasi kebijakan, dan (c) risiko tata kelola implementasi dalam satu kerangka teoritis yang terpadu (Firmansyah dkk., 2024a; Octavia & Nirmala, 2026).

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut. Dengan menggunakan kerangka teori sistem politik David Easton sebagai peta analitis yang mencakup komponen *input*, *conversion*, *output*, dan *feedback* kajian ini bertujuan menganalisis secara kritis-berimbang proses formulasi kebijakan MBG dan mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan yang diklaim dengan desain intervensi yang diterapkan. Kebaruan (*novelty*) studi ini terletak pada pengintegrasian tiga dimensi analisis yang selama ini dikaji secara terpisah: dimensi epidemiologi gizi (apakah desain program kausal terhadap penurunan stunting?), dimensi formulasi kebijakan (apakah proses *conversion* memenuhi prinsip-prinsip kebijakan berbasis bukti?), dan dimensi tata kelola (apakah mekanisme implementasi memenuhi



standar akuntabilitas publik?). Ruang lingkup studi mencakup periode 2024–2026, dengan fokus pada analisis dokumen kebijakan, data gizi nasional, dan temuan lembaga pengawas independen terhadap program MBG di seluruh wilayah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kebijakan kritis (*critical policy analysis*). Data dikumpulkan melalui studi dokumen dari tiga kategori sumber: (1) data primer resmi pemerintah meliputi SKI 2023, SSGI 2024 (BKPK Kemenkes RI), laporan realisasi anggaran MBG Kemenkeu RI, dan dokumen BGN; (2) laporan lembaga independen dan pengawas meliputi kajian Transparency International Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Ombudsman RI, Celios, CISDI, dan Lowy Institute; serta (3) jurnal ilmiah internasional dan nasional terindeks mengenai program makan sekolah, stunting, dan 1.000 HPK (Amila Nkk Gamage, 2025; Creswell & Guetterman, 2025; Haq & Yasin, 2025; Johnson & Christensen, 2020).

Analisis dilakukan dengan menerapkan kerangka teori sistem Easton sebagai peta konseptual untuk memetakan aliran input, proses konversi, output, dan feedback kebijakan MBG. Posisi kritis-berimbang dalam artikel ini berarti mengakui tujuan dan manfaat yang ada dari MBG, sekaligus secara argumentatif mempersoalkan ketepatan logika kausal, desain sasaran, dan kualitas tata kelola program.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Gizi Anak Indonesia: Memperbarui Basis Fakta

Sebelum menganalisis kebijakan MBG, penting untuk menetapkan data gizi anak Indonesia yang terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tabel 1 menyajikan perbandingan antara data yang diklaim dalam narasi resmi pemerintah dengan data resmi yang bersumber dari survei nasional.

Tabel 1. Data Gizi Anak Indonesia: Klaim vs. Data Resmi Terverifikasi

| Indikator       | Klaim Awal<br>(Kemenko<br>PMK) | Data Terverifikasi                   | Sumber Resmi        |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Stunting balita | 18,7% (anak 5-12 thn)          | 21,5% (0-59 bln, 2023); 19,8% (2024) | SKI 2023; SSGI 2024 |
| Wasting/kurus   | 11%                            | 10,2% (balita, 2024)                 | WHO/UNICEF JME 2024 |

|                                  |                                 |                                                                                            |                        |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Obesitas anak sekolah            | 19,7%                           | 20% (1 dari 5 anak sekolah)                                                                | UNICEF Indonesia, 2023 |
| Anemia anak                      | 16,3%                           | 23,8% (SKI 2023)                                                                           | Kemenkes RI / SKI 2023 |
| Anak mengalami kelaparan         | 41% (klaim belum terverifikasi) | 46% <i>balita food poverty</i> (UNICEF, 2024); 17,6% penduduk pangan tak cukup (BPS, 2023) | UNICEF 2024; BPS 2023  |
| <i>Undernourishment nasional</i> | –                               | 8,5% (2023), turun dari 10,2% (2022)                                                       | FAO/WFP 2024           |

Sumber: diolah dari berbagai sumber resmi UNICEF Indonesia, (2024), Kemenkes, (2025), BPKP, (2025)

Tabel 2. Tren Stunting Balita Indonesia 2018-2024

| Tahun       | Prevalensi Stunting | Sumber Resmi             | Keterangan                             |
|-------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 2018        | 31,4%               | Riskesdas 2018, Kemenkes | Titik awal penurunan                   |
| 2021        | 24,4%               | SSGI 2021, Kemenkes      | –                                      |
| 2022        | 21,6%               | SKI 2022, Kemenkes       | –                                      |
| 2023        | 21,5%               | SKI 2023, Kemenkes       | Data nasional representatif            |
| 2024        | 19,8%               | SSGI 2024, BPKP Kemenkes | Lampaui target 20,1%; dirilis Mei 2025 |
| Target 2025 | 18,8%               | RPJMN 2020-2029          | Masih membutuhkan upaya keras          |
| Target 2029 | 14,2%               | RPJMN 2020-2029          | –                                      |

Sumber: BPKP, (2025)

Analisis Input: Legitimasi Tuntutan, Kelemahan Basis Bukti

Dalam kerangka Easton, input kebijakan terdiri dari tuntutan (*demands*) dan dukungan (*supports*). Tuntutan terhadap intervensi gizi pemerintah jelas legitim secara sosial: dengan prevalensi stunting 21,5% (SKI 2023) dan beban gizi ganda yang kompleks, ada kebutuhan nyata yang menuntut respons negara.

Namun terdapat persoalan serius pada kualitas basis bukti yang menopang desain input. Pertama, klaim bahwa '41% siswa mengalami kelaparan' yang menjadi justifikasi utama MBG tidak dapat ditelusuri pada data survei nasional resmi Kemenkes atau Kemenko PMK yang dipublikasikan secara terbuka. Data yang terverifikasi adalah 46% anak balita Indonesia mengalami *child food poverty* sedang/berat UNICEF Indonesia, (2024) dan 17,6% penduduk memiliki konsumsi

pangan tidak cukup (BPS, 2023) keduanya merupakan ukuran yang berbeda dari klaim asli. CISDI (2025) secara eksplisit mengkritik bahwa formulasi kebijakan MBG tidak dilakukan dengan studi dampak awal dan analisis biaya-manfaat yang memadai.

Kedua, dan ini adalah persoalan yang lebih mendasar: tuntutan 'turunkan stunting' direspons dengan kebijakan yang secara epidemiologi tidak memiliki hubungan kausal langsung dengan penurunan stunting. Ini adalah kegagalan pada tahap input itu sendiri ketika tuntutan publik yang valid ditangkap dan diframing secara keliru oleh para aktor kebijakan (Tamma Nisrina Lutfi dkk., 2026).

### Analisis *Conversion*: Proses Politik yang Terburu-Buru

Tahap *conversion* menggambarkan bagaimana tuntutan publik diolah menjadi keputusan kebijakan (Almond, 1997). Dalam kasus MBG, proses ini ditandai oleh kecepatan yang luar biasa namun diimbangi oleh minimnya transparansi dan partisipasi publik. MBG dipersiapkan dalam kurun waktu kurang dari empat bulan dari penerbitan Perpres No. 83/2024 tentang pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Agustus 2024 hingga peluncuran nasional pada Januari 2025. ICW (2025) mencatat bahwa rentetan kebijakan MBG tampak hanya mengakomodasi ambisi politis agar program dapat berjalan di awal kepemimpinan, tanpa perencanaan teknokratis yang matang. Produk kebijakan tertinggi yang mengatur MBG hanya berupa Surat Keputusan Kedeputusan Lembaga bukan Peraturan Presiden sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk mengatur aspek tata kelola, standar keamanan pangan, dan akuntabilitas anggaran secara mengikat.

Proses *conversion* yang sehat semestinya melibatkan konsultasi publik, kajian lintas kementerian yang mendalam, uji coba terbatas (*pilot study*), dan verifikasi basis bukti ilmiah sebelum ekspansi massal. Hal-hal ini tidak terjadi dalam kasus MBG.

### Analisis *Output*: Realisasi Program dan Capaian Terukur

Tabel 3. Realisasi Anggaran dan Capaian Program MBG 2025

| Periode           | Anggaran Terserap    | Penerima Manfaat | SPPG Aktif | Sumber      |
|-------------------|----------------------|------------------|------------|-------------|
| Alokasi APBN 2025 | Rp 71 triliun        | Target 17,9 juta | –          | Kemenkeu RI |
| Maret 2025        | Rp 710,5 miliar (1%) | 2,05 juta        | 726        | Kemenkeu RI |



|                          |                            |                  |               |                     |
|--------------------------|----------------------------|------------------|---------------|---------------------|
| Juni 2025                | Rp 5 triliun (7%)          | 5,58 juta        | 1.863         | Sri Mulyani         |
| Desember 2025            | Rp 51,5 triliun<br>(72,5%) | 41,9 juta        | 17.555        | Kemenkeu RI         |
| Januari 2026             | –                          | 56,13 juta       | –             | Kemenkeu RI         |
| <b>Target akhir 2025</b> | <b>Rp 171 triliun</b>      | <b>82,9 juta</b> | <b>30.000</b> | <b>BGN/Presiden</b> |

Sumber: diolah dari data Kemnko PMK, (2025); BGN, (2026)

Secara kuantitas, capaian penyerapan anggaran dan jumlah penerima menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Namun output kuantitatif ini harus dibaca bersamaan dengan kualitas dan ketepatan sasaran program (Reni Saptati D.I, 2026).

### Persoalan Fundamental: Kesalahan Logika Kausal

Inilah inti dari permasalahan yang paling mendasar dalam desain MBG. Program ini diposisikan sebagai solusi stunting, namun menyasar kelompok yang secara ilmiah bukan merupakan target efektif untuk pencegahan stunting (BGN, 2026; Sufyan dkk., 2024).

Konsensus ilmiah global yang sudah disepakati oleh para ahli kesehatan, nutrisi, dan epidemiologi seluruh dunia menetapkan bahwa stunting terbentuk secara kumulatif dalam periode 1.000 HPK mulai dari kehamilan hingga anak berusia 23 bulan. Pada usia inilah otak, sistem imun, dan pertumbuhan fisik anak dibentuk secara permanen. Kerusakan yang terjadi akibat malnutrisi pada periode 1.000 HPK bersifat permanen dan tidak dapat sepenuhnya dipulihkan oleh intervensi gizi di usia sekolah.

Dengan kata lain, seorang siswa kelas 3 SD yang menerima MBG hari ini dan sudah mengalami stunting telah mengalami kerusakan pertumbuhan sejak bertahun-tahun sebelum ia menginjakkan kaki ke sekolah. Memberikan makan bergizi kepadanya sangat bermanfaat untuk konsentrasi belajar dan kesehatan sehari-hari, tetapi tidak akan mengembalikan pertumbuhan tinggi badan yang sudah tertinggal akibat malnutrisi kronis di masa awal kehidupannya.

Sementara itu, data BGN sendiri mengungkapkan bahwa proporsi sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita kelompok yang secara ilmiah paling kritis untuk pencegahan stunting hanya sebesar 10% dari total sasaran peserta didik di setiap SPPG (Kemnko PMK, 2025). Ini adalah inversi dari apa yang seharusnya menjadi prioritas.

Tabel 4. Perbandingan Logika Kebijakan MBG vs. Konsensus Ilmiah Stunting

| Dimensi              | Logika MBG (Pemerintah)                                                                          | Konsensus Ilmiah (1.000 HPK)                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sasaran utama        | Anak SD-SMA/SMK (6-18 tahun)                                                                     | Ibu hamil, ibu menyusui, bayi-balita 0-23 bulan                                              |
| Mekanisme intervensi | Makan siang bergizi 1x/hari di sekolah                                                           | Suplementasi gizi ibu hamil, ASI eksklusif, MPASI berkualitas, posyandu terintegrasi         |
| Dampak pada stunting | Tidak dapat membalik stunting yang sudah terjadi; manfaat pada konsentrasi belajar dan kehadiran | Mencegah terjadinya stunting baru sebelum jendela kritis tertutup                            |
| Basis bukti          | Lemah untuk klaim anti-stunting; lebih kuat untuk dampak pendidikan jangka pendek                | Kuat: didukung ratusan studi RCT dan meta-analisis global                                    |
| Efektivitas biaya    | Rendah untuk tujuan penurunan stunting (Celios: <i>inclusion error</i> 34,2%)                    | Tinggi: investasi pada 1.000 HPK adalah investasi dengan return tertinggi (World Bank, 2023) |

Sumber: diolah dari Wang dkk., (2024) Askar dkk., (2025),

Persoalan Tata Kelola: SPPG sebagai Arena Rente

Di luar persoalan logika kausal, MBG juga menghadapi krisis tata kelola yang serius. Transparency International Indonesia (2025) melalui kajian Corruption Risk Assessment mengidentifikasi risiko utama: penunjukan mitra pelaksana SPPG dilakukan tanpa mekanisme verifikasi terbuka, dan beberapa yayasan pengelola diketahui memiliki afiliasi dengan aktor politik, institusi militer, dan kelompok kekuasaan tertentu.

ICW (2025) menemukan bahwa dari penelusuran lebih dari 100 yayasan mitra MBG, sepertiga di antaranya memiliki afiliasi politik yang signifikan. Yang lebih mengejutkan, tercatat 1.179 unit SPPG dimiliki oleh Polri dan 452 unit oleh TNI yang tersebar di seluruh Indonesia dengan Polri menargetkan pembangunan SPPG hingga 1.500 unit pada 2026. Keterlibatan institusi keamanan sebagai operator program pangan nasional menandai fenomena baru: de-sibilisasi kebijakan kesejahteraan sosial.

Investigasi Tempo (2025) mengungkapkan bahwa aktor dibalik sejumlah yayasan pengelola SPPG merupakan keluarga dan pendukung Presiden Prabowo dalam pemilihan presiden 2024. Ombudsman RI, (2025) menemukan delapan masalah utama maladministrasi, termasuk penetapan mitra yang tidak transparan, standar pengolahan makanan yang tidak konsisten, dan sistem pengawasan yang belum terintegrasi. Hingga September 2025, terdapat 6.452 kasus keracunan

makanan yang melibatkan MBG .

Dari sisi fiskal, perlu dicatat pula polemik mengenai sumber dana. Berdasarkan Perpres 118/2025, dana sebesar Rp 223 triliun untuk BGN dikategorikan sebagai bagian dari anggaran pendidikan dalam APBN 2026, menyebabkan anggaran pendidikan efektif yang tersisa hanya 14,2% dari total APBN di bawah mandat konstitusional 20% (Pasal 31 ayat 4 UUD 1945). Hal ini sedang diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi.

Tabel 5.

Peta Risiko dan Temuan Lembaga Pengawas Independen terhadap MBG

| Lembaga Pengawas                            | Temuan Utama                                                                                                                                                                       | Rekomendasi                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Transparency International Indonesia (2025) | Ketiadaan Perpres sebagai payung hukum; SPPG ditunjuk tanpa verifikasi terbuka; afiliasi aktor politik dan militer; potensi kerugian Rp 1,8 miliar/tahun per SPPG                  | Moratorium segera; reformasi seleksi SPPG; penguatan regulasi          |
| Indonesia Corruption Watch (2025)           | 1/3 yayasan mitra SPPG berafiliasi politik; dominasi TNI/Polri; larangan publikasi program yang membuka peluang korupsi                                                            | Transparansi penuh data SPPG; audit investigatif BPK dan KPK           |
| Ombudsman RI, (2025)                        | 8 masalah maladministrasi: kesenjangan target-realisasi, keracunan massal, penetapan mitra tidak transparan, beban guru, standar gizi tidak konsisten                              | Dashboard digital real-time; BPOM terlibat penuh; evaluasi per SPPG    |
| Askar dkk., (2025)                          | Inclusion error 34,2%; potensi pemborosan Rp 8,4 triliun; 50–60% orang tua tidak melihat perubahan berat badan anak; mayoritas responden lebih memilih bantuan tunai               | Alihkan ke program bertarget: PKH, BPJS gratis, subsidi gizi 1.000 HPK |
| CISDI (2025)                                | Perencanaan tidak berbasis evidence; tidak ada impact assessment dan cost-benefit analysis yang transparan; harga per porsi Rp 10.000 terlalu rendah untuk standar gizi yang layak | Reformasi desain kebijakan; adopsi standar NOVA untuk kualitas pangan  |
| Policy Research Center/Porec (Maret 2026)   | 87% warga meyakini MBG rawan korupsi; 88,5% responden menilai manfaat mengalir ke elite politik (44,5%) dan pemilik SPPG (44%)                                                     | Moratorium; evaluasi independen; redesain berbasis komunitas           |

Sumber: diolah dari Ombudsman RI, (2025), Askar dkk., (2025)

## Analisis Feedback: Siklus yang Belum Bekerja

Dalam teori Easton, feedback adalah mekanisme koreksi diri sistem politik. Sistem yang sehat akan menyerap feedback negatif berupa kritik publik, temuan lembaga pengawas, atau bukti kegagalan program dan menggunakannya untuk merevisi kebijakan.

Feedback negatif terhadap MBG sudah sangat melimpah: 6.452 kasus keracunan, temuan korupsi oleh TII dan ICW, 8 catatan maladministrasi Ombudsman, *inclusion error* 34,2% menurut Celios, dan 87% publik yang meragukan integritas program (Sutrisno dkk., 2026). Namun respons pemerintah terhadap feedback ini cenderung defensif: Kepala BGN menyatakan 'tidak mungkin ada korupsi', Presiden menyebut kasus keracunan hanya 0,00017% dari total porsi yang dibagikan, dan berbagai kritik dari masyarakat sipil didiskreditkan sebagai bentuk '*nyinyir*'. Ini adalah indikasi kegagalan mekanisme feedback dalam sistem politik Easton ketika output yang bermasalah tidak menghasilkan konversi ulang yang korektif, melainkan justru mempertahankan status quo melalui mekanisme legitimasi populis.

**Tabel 6. Analisis Komprehensif MBG Berdasarkan Teori Sistem Politik David Easton**

| Komponen Easton | Deskripsi & Fakta                                                                                                  | Analisis Kritis                                                                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INPUT: Tuntutan | Stunting 21,5% (SKI 2023); anemia anak 23,8%; beban gizi ganda; tuntutan publik atas intervensi negara             | Tuntutan legitim, namun diframing keliru: 'turunkan stunting' direspons dengan program makan sekolah yang secara kausal tidak efektif menurunkan stunting |
| INPUT: Dukungan | Visi Indonesia Emas 2045; dukungan DPR, WHO, World Bank; janji kampanye presiden terpilih                          | Dukungan politik kuat tetapi basis teknis lemah: tidak ada kajian dampak pra-implementasi yang dipublikasikan (CISDI, 2025)                               |
| CONVERSION      | Perpres 83/2024 (BGN); alokasi APBN Rp 71 T; sistem SPPG sebagai unit distribusi; Inpres 1/2025 efisiensi anggaran | Proses berlangsung dalam 4 bulan tanpa transparansi; SPPG ditunjuk tanpa kompetisi terbuka; dasar hukum lemah (hanya Juklak internal BGN)                 |
| OUTPUT          | Des 2025: 41,9 juta penerima; 17.555 SPPG; 741.985 tenaga kerja terserap; anggaran Rp 51,5 T (72,5%)               | Capaian kuantitatif signifikan namun: (1) bukan sasaran kritis stunting; (2) 6.452 kasus keracunan; (3) inclusion error 34,2%; (4) >50%                   |

|              |                                                                                                                                   |                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                   | orang tua tidak melihat perubahan gizi anak                                                                                   |
| FEEDBACK (+) | Penurunan stunting 19,8% (SSGI 2024) namun ini adalah tren yang sudah berlangsung sejak 2018 sebelum MBG diluncurkan              | Korelasi tidak sama dengan kausalitas: penurunan stunting 2024 tidak dapat dikreditkan ke MBG yang baru berjalan Januari 2025 |
| FEEDBACK (-) | 87% publik yakin MBG rawan korupsi (Porec 2026); 6.452 keracunan; temuan TII, ICW, Ombudsman; gugatan MK atas anggaran pendidikan | Mekanisme feedback belum bekerja: respons pemerintah defensif, tidak ada reformasi struktural yang signifikan                 |

*Sumber: diolah dari berbagai sumber (2025–2026)*

### Manfaat yang Nyata: Membaca MBG Secara Berimbang

Posisi kritis-berimbang mengharuskan pengakuan atas manfaat nyata yang memang ada dari MBG. Studi meta-analisis Wang et al. (2021) yang meninjau 57 studi di negara berpendapatan rendah dan menengah menemukan bahwa program makan sekolah secara signifikan meningkatkan kehadiran siswa (+2,6% hari sekolah), berat badan (+0,58 kg), dan tinggi badan (+0,32 cm) dalam 12 bulan. Wall et al. (2022) juga mengkonfirmasi korelasi positif antara program makan sekolah dan kemampuan belajar serta partisipasi pendidikan.

Olehnya, MBG memiliki manfaat yang terukur dan berbasis bukti dalam dimensi pendidikan jangka pendek: anak-anak yang tidak lapar lebih mudah berkonsentrasi belajar, kehadiran sekolah meningkat, dan partisipasi pendidikan membaik. Program ini juga menciptakan multiplier ekonomi lokal melalui rantai pasok yang melibatkan petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

Masalahnya adalah ketika manfaat yang nyata dalam dimensi pendidikan ini dikomunikasikan seolah-olah setara dengan penurunan stunting sebuah klaim yang melampaui apa yang secara ilmiah dapat diharapkan dari intervensi jenis ini.

### SIMPULAN

Berdasarkan analisis menggunakan teori sistem politik David Easton dengan perspektif kritis-berimbang, maka dapat disimpulkan beberapa hal pokok:

*Pertama*, MBG lahir dari tuntutan publik yang legitim dan mendesak terhadap persoalan gizi anak di Indonesia. Namun terdapat cacat epistemologis yang fundamental dalam desainnya: program ini tidak memiliki hubungan kausal yang kuat dengan penurunan stunting karena menyasar anak sekolah (6-18 tahun) yang sudah melewati jendela kritis 1.000 HPK. Ini bukan sekadar kekurangan implementasi, melainkan kegagalan desain kebijakan yang mendasar.

*Kedua*, proses conversion berlangsung terlalu cepat tanpa transparansi,



partisipasi publik yang memadai, atau kajian berbasis bukti yang komprehensif. Akibatnya, SPPG sebagai ujung tombak program justru menjadi arena rente bagi aktor berkoneksi politik dan militer, sebagaimana dikonfirmasi oleh TII, ICW, dan Ombudsman RI.

*Ketiga*, output kuantitatif MBG memang mengesankan dalam hal jumlah penerima manfaat (41,9 juta per akhir 2025). Namun output kualitatif jauh dari memuaskan: inclusion error 34,2%, 6.452 kasus keracunan, dan lebih dari separuh orang tua tidak melihat perubahan status gizi anak.

*Keempat*, mekanisme feedback dalam sistem politik belum bekerja secara efektif. Respons defensif pemerintah terhadap temuan-temuan kritis dari lembaga independen menghambat koreksi kebijakan yang diperlukan. Kepercayaan publik yang merosot dengan 87% warga meyakini program rawan korupsi merupakan indikasi krisis legitimasi yang serius. Program dengan skala dan anggaran sebesar MBG berpotensi menjadi tonggak bersejarah dalam pembangunan SDM Indonesia tetapi hanya jika dijalankan dengan desain yang tepat, tata kelola yang bersih, dan komitmen pada bukti ilmiah, bukan sekadar ambisi politik.

Berdasarkan simpulan di atas, maka direkomendasikan reformasi struktural berikut: 1. Redesain sasaran: Alihkan prioritas dari anak sekolah ke kelompok 1.000 HPK (ibu hamil, ibu menyusui, balita 0-23 bulan) sebagai inti program anti-stunting. Program makan sekolah dapat dipertahankan sebagai program pendidikan, bukan diklaim sebagai solusi stunting; 2. Reformasi tata kelola SPPG: Lakukan audit total seluruh mitra SPPG, terbitkan database terbuka yang mencantumkan kepemilikan dan rekam jejak setiap SPPG, dan larang penunjukan langsung tanpa kompetisi terbuka; 3. Penguatan basis hukum: Terbitkan Peraturan Presiden yang komprehensif sebagai payung hukum MBG, termasuk standar HACCP untuk keamanan pangan, mekanisme audit independen berkala, dan sanksi yang jelas bagi pelanggaran; 4. Prioritas wilayah 3T: Konsentrasikan intervensi pada daerah-daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang justru paling sulit dijangkau dan paling membutuhkan; 5. Evaluasi berbasis bukti: Lakukan impact assessment secara berkala oleh lembaga independen yang mengukur perubahan status gizi aktual, bukan sekadar jumlah penerima manfaat atau SPPG yang aktif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A'ini, S., Nst, S. W. R., Lubis, A. S., Fakhreni, F., & Harahap, R. A. (2023). Edukasi Program Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam Pencegahan Stunting dengan Media Promosi. *Jurnal Ilmiah Universitas*

- Batanghari                      Jambi,                      23(2),                      2091–2097.  
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3317>
- Albaburrahim, A., Putikadyanto, A. P. A., Efendi, A. N., Alatas, M. A., Romadhon, S., & Wachidah, L. R. (2025). Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 767–780. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i.19191>
- Almond, G. A. (1997). The political system and comparative politics. *Contemporary empirical political theory*, 219–230.
- Amila Nkk Gamage. (2025). A comparative analysis of qualitative and mixed methods research: Strengths, limitations, and practical applications. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 25(3), 2040–2046. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2025.25.3.0947>
- Askar, M. W., Hidayah, I., Fikri, B., Darmawan, J., Lianasari, A., & Muhammad, G. D. (2025). *Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis*. Center of Economic and Law Studies (Celios) Jakarta, Indonesia.
- BGN. (2026). *BGN: Dari Rp268T, 93% Anggaran Digunakan Langsung untuk Bantuan MBG: Nomor: SIPERS-181/BGN/03/2026*. Badan Gizi Nasional. <https://bgn.go.id/news/siaran-pers/siaran-pers-kepala-badan-gizi-nasional/bgn-dari-rp268t-93-anggaran-digunakan-langsung-untuk-bantuan-mbg>
- BKPK, H. (2025, Mei 27). SSGI 2024: National Stunting Prevalence Drops to 19,8% - Health Development Policy Agency | BPKP Kemenkes. *Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | BPKP Kemenkes*. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/en/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198/>
- Creswell, J. W., & Guetterman, T. C. (2025). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (Seventh edition). Pearson Education.
- Fatimah, S., Rasyid, A., Anirwan, A., Qamal, Q., & Arwakon, H. O. (2024). Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 4(1), 14–21. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v4i1.641>
- Firmansyah, H., Purba, E. M., Purba, R., & Rosmiati, R. (2024a). Ecological Regi Mokodongan, Cs: Analisis Formulasi Kebijakan Program Makan Gratis .... Page 84

- Studies on The Association of Food Insecurity and Malnutrition in Indonesia: A Literature Review. *International Conference On Research And Development (ICORAD)*, 3(1), 129–139. <https://doi.org/10.47841/icorad.v3i1.193>
- Firmansyah, H., Purba, E. M., Purba, R., & Rosmiati, R. (2024b). Household food insecurity and its association with nutritional status of under five children in Indonesia. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 7(10), 2546–2552.
- Haq, M., & Yasin, N. (2025). Qualitative, Quantitative, and Mixed Methodology Paradigms. *Journal of Practical Studies in Education*, 6(6), 15–29. <https://doi.org/10.46809/jpse.v6i6.144>
- Johnson, B., & Christensen, L. B. (2020). *Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches* (Seventh edition). SAGE.
- Kemkes. (2025, Mei 26). *SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%*. <https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198>
- Kemnko PMK. (2025, Oktober 31). *Kemenko PMK Meninjau Pelaksanaan Pemberian Makan Bergizi Gratis Sebagai Upaya Pencegahan Stunting*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-meninjau-pelaksanaan-pemberian-makan-bergizi-gratis-sebagai-upaya-pencegahan-stunting>
- Khatimah, A. W. N., Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025). Rasionalisme Dalam Kebijakan Publik: Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesejahteraan Pelajar: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 1969–1976. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.815>
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 101–112. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>
- Masitoh, S., Nurokhmah, S., & Ronoatmodjo, S. (2023). The Correlation Between Food Insecurity Level and Stunting in Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 13(3), 385–398. <https://doi.org/10.26553/jikm.2022.13.2.385-398>

- Muharram, F. R., Tjandra, S., Madani, N. J., Rokx, C., & Abdullah, A. (2025). Trends in the double burden of malnutrition among Indonesian adults, 2007 to 2023. *Scientific Reports*, 15(1), 34883. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-17348-9>
- Mulu, E., & Mengistie, B. (2017). Household food insecurity and its association with nutritional status of under five children in Sekela District, Western Ethiopia: A comparative cross-sectional study. *BMC Nutrition*, 3(1), 35. <https://doi.org/10.1186/s40795-017-0149-z>
- Octavia, L., & Nirmala, I. R. (2026). From gene to plate in Indonesia: A food system framework for the triple burden of malnutrition. *Frontiers in Public Health*, 14, 1755411. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2026.1755411>
- Ombudsman RI. (2025, Januari 10). *Ombudsman RI Temukan Empat Potensi Maladministrasi dalam Program Makan Bergizi Gratis*. Ombudsman.Go.Id. <https://ombudsman.go.id:443/news/r/ombudsman-ri-temukan-empat-potensi-maladministrasi-dalam-program-makan-bergizi-gratis>
- Reni Saptati D.I. (2026). *Optimalisasi Program MBG Berpotensi Hemat Rp20 Triliun*. Media Keuangan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/optimalisasi-program-mbg-berpotensi-hemat-rp20-triliun>
- Soetono, B., & Barokah, A. S. (2024). *TRENDS IN STUNTING PREVALENCE REDUCTION: AN EXAMINATION OF DATA TOWARD ACHIEVING THE 2024 TARGET IN INDONESIA*. 3. <https://doi.org/10.53947/tspj.v3i1.795>
- Sufyan, D. L., Soe, L. T., Syah, M. N. H., Wahyuningsih, U., Marjan, A. Q., & Noor, S. L. (2024). Prevalence and Determinants of the Double Burden of Malnutrition at Household Level: A Systematic Review. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 19(4), 645–655. <https://doi.org/10.15294/kemas.v19i4.47245>
- Suhaeni, C., Mualifah, L. N. A., & Wijayanto, H. (2025). LDA Topic Modeling Analysis of Public Discourse on Indonesia's Free Nutritious Meals Program (MBG). *IJID (International Journal on Informatics for Development)*, 14(1), 587–600. <https://doi.org/10.14421/ijid.2025.5211>
- Sutrisno, R., Fatmawati, I. D., Laksono, A. D., Rahmawati, W., Wirawan, N. N., & Handayani, D. (2026). The role of household food insecurity in malnutrition

- among Indonesian children under 5 years of age: A systematic review and meta-analysis (2015–2025). *Public Health Nutrition*, 29(1), e86. <https://doi.org/10.1017/S1368980026102365>
- Tamma Nisrina Lutfi, Akmal Adnan Attamami, Syamia Banin, Ridha Inayah Panggabean, & Fitri Ainun Malahayati. (2026). *Public health and economic implications of hypertension in the context of Indonesia's double burden of malnutrition*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.20436691>
- UNICEF Indonesia. (2024, November). *Climate change and nutrition in Indonesia* |. UNICEF Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/nutrition/reports/climate-change-and-nutrition-indonesia>
- Wahyuni, W., Lestari, T. P., Apriliana, M., & Gumelta, R. (2025). Implementation of BERTopic for Topic Modeling Analysis of the Free Nutritious Meal Program Based on YouTube Comments. *Journal of Applied Informatics and Computing*, 9(4), 1964–1971. <https://doi.org/10.30871/jaic.v9i4.9754>
- Wang, D., Shinde, S., Young, T., & Fawzi, W. W. (2021). Impacts of school feeding on educational and health outcomes of school-age children and adolescents in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Global Health*, 11, 04051. <https://doi.org/10.7189/jogh.11.04051>
- Wang, W., Xiang, W., Li, C., Qiu, S., Wang, Y., Wang, X., Bu, S., & Bian, Q. (2024). A Case Study of Pavement Foundation Support and Drainage Evaluations of Damaged Urban Cement Concrete Roads. *Applied Sciences*, 14(5), 1791. <https://doi.org/10.3390/app14051791>
- Zerga, A. A., Tadesse, S. E., Ayele, F. Y., & Ayele, S. Z. (2022). Impact of malnutrition on the academic performance of school children in Ethiopia: A systematic review and meta-analysis. *SAGE Open Medicine*, 10, 20503121221122398. <https://doi.org/10.1177/20503121221122398>